



Peranan Institut Dialog Antraiman dalam Mencegah Intoleransi di Yogyakarta

Selly Septiani ^{a,1}, Marzuki ^{b,2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Peran Institut Dialog Antraiman dalam mencegah permasalahan intoleransi, (2) peran Institut Dialog Antariman dalam merespons isu-isu intoleransi, (3) faktor penghambat Institut Dialog Antariman dalam mencapai visi misinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian narasi. Subjek penelitian ini meliputi: (1) Direktur Institut Dialog Antariman, (2) Wakil Direktur Institut Dialog Antariman, (3) Ketua Pengurus Institut Dialog Antraiman, (4) Staff Bidang Pendidikan Institut Dialog Antariman, (5) Staff Bidang Penelitian dan Pengembangan Institut Dialog Antariman, (6) Staff Bidang Evaluasi dan Monitoring Institut Dialog Antariman, (7) Staff Bidang Media Sosial Institut Dialog Antariman. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan datanya dilakukan dengan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peranan Institut Dialog Antariman dalam mencegah isu-isu intoleransi berupa melaksanakan program kerja Sekolah Lintas Iman (SLI), pelatihan guru-guru dan pelatihan kapasitas pemuda lintas iman, (2) Peranan Institut Dialog Antariman dalam merespons isu-isu intoleransi yaitu berupa melaksanakan program kerja lobi advokasi, (3) faktor penghambat Institut Dialog Antariman dalam mencapai visi misinya berupa faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal seperti perdebatan menggunakan value humanisme dan pluralisme, kurangnya SDM, kurangnya dana, kurang efektif memperkerjakan mahasiswa dan *miss communication*. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu sulitnya menyatukan orang berbeda latar belakang, terkendala sinyal dan kurangnya skill menggunakan medsos.

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the role of the Institute for Interfaith Dialogue in preventing problems of intolerance, (2) the role of the Institute for Interfaith Dialogue in responding to issues of intolerance, (3) inhibiting factors of the Institute for Interfaith Dialogue in achieving its vision and mission. This study uses a qualitative approach and the type of narrative inquiry (narrative inquiry). The subjects of this research include: (1) Director of the Institute for Interfaith Dialogue, (2) Deputy Director of the Institute for Interfaith Dialogue, (3) Chairperson of the Management of the Institute for Interfaith Dialogue, (4) Staff for Education at the Institute for Interfaith Dialogue, (5) Staff for Research and Development of the Institute Interfaith Dialogue, (6) Staff for Evaluation and Monitoring of the Interfaith Dialogue Institute, (7) Staff for Social Media at the Institute for Interfaith Dialogue. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Checking the data is done by triangulation. Data analysis technique is done by collecting data, condensing, presenting data and drawing conclusions. Based on the results of this study, it shows: (1) The role of the Interfaith Dialogue Institute in preventing issues of intolerance in the form of implementing the Interfaith School (SLI) work program, teacher training and capacity training for interfaith youth, (2) The role of the Interfaith Dialogue Institute in responding issues of intolerance, namely in the form of implementing advocacy lobby work programs, (3) inhibiting factors for the Institute of Interfaith Dialogue in achieving its vision and mission in the form of internal factors and external factors, internal factors such as lack of human resources, lack of funds, ineffective hiring of students and miss communication. Meanwhile, the external factors are the difficulty of embracing people from different backgrounds, signal constraints and lack of skills in using social media.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Peranan, Intoleransi, LSM

Keywords:

Role, Intolerance, NGOs

Pendahuluan

Intoleransi merupakan permasalahan krusial yang masih sering terjadi di Indonesia. Permasalahan ini termasuk krusial karena sering menyangkut persoalan agama yang dipandang sangat sensitif. Terlebih lagi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam latar belakang mulai dari agama, bahasa, suku, ras maupun adat istiadat.

Intoleransi merupakan lawan dari kata “toleran”. Kata toleran berarti ketidakmauan untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda, serta tidak setuju terhadap apa yang diyakini oleh selain dirinya (Haryani, 2019, hal. 284). Selain itu intoleransi dapat didefinisikan sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberi hak pada orang lain atau kelompok yang berbeda, baik yang berbeda keyakinan, ideologis, dtatus sosial ataupun etnik (Rosyad, 2018, hal. 15).

Menurut Dunn dan Sing dalam (Seftiani dkk, 2020, hal. 12) menjelaskan bahwa intoleransi merupakan sebuah tindakan yang berorientasi negatif seperti penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang ia tidak setujui. Dalam realitanya, intoleransi dapat dibedakan berdasarkan manifestasi tindakannya, yakni berupa intoleransi kekerasan dan intoleransi non-kekerasan. Kemudian, definisi lain menyebutkan bahwa Intoleransi merupakan kebalikan dari kata toleransi yang memiliki makna sikap yang merepresentasikan adanya suatu kebencian, iri hati, saling tidak memahami, tidak mau mengalah, dan lebih mementingkan dirinya sendiri ataupun golongannya dari pada kepentingan bersama (Aslati dkk, 2019, hal. 231).

Intoleransi berdasarkan agama merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yang berbunyi “setiap pembeda, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favouritism*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama”(Halili, 2016, hal. 20).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Wahid Institut pada tahun 2019 menunjukkan bahwa intoleransi dan radikalisme meningkat dari tahun ke tahun dari sebelumnya 46% menjadi 54% (Subagya, 2020, hal. 14-15). Kemudian tahun 2018 pada bulan Juni tercatat ada 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan diantaranya DKI Jakarta sebanyak 23 peristiwa, Jawa Barat sebanyak 19 peristiwa, Jawa Timur sebanyak 15 peristiwa dan D.I Yogyakarta sebanyak 9 peristiwa dan NTB sebanyak 7 peristiwa (Widiatmoko, dkk, 2021, hal. 34).

Yogyakarta merupakan sebuah kota yang dijuluki dengan kota pelajar. Yogyakarta juga merupakan kota istimewa baik penduduk asli maupun bagi para pendatang. Namun dibalik keistimewaannya, kota Yogyakarta masih terjadi kasus intoleransi. Beberapa kasus intoleransi yang terjadi pada tahun 2018 diantaranya: (1) penolakan perizinan mendirikan bangunan (IMB) Kantor Sekretariat Gereja Kristen Jawa (GKJ) Klasis di Gunung Kidul, (2) penolakan sedekah laut, (3) perusakan barang di Pengadilan Negeri Bantul oleh ormas, (4) kasus pemotongan salib di pemakaman umum, (5) penolakan warga nonmuslim di Bantul (Rusdi, 2021, hal. 136).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai isu-isu intoleransi tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk mencegah intleransi baik yang ditanamkan di Lembaga Pendidikan, kebijakan pemerintah ataupun masyarakat. Selain itu perlu kerja sama sinergis antara masyarakat dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian LSM pun memiliki peran untuk turut mencegah intoleransi. LSM sebagai sebuah wadah yang turut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan serta ikut menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial memiliki peran katif untuk

memelihara serta menciptakan keadaan yang kondusif dalam masyarakat (Herdiansah & Randi, 2016, hal. 62).

Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) merupakan sebuah LSM yang turut aktif mempromosikan pentingnya merawat dan menghidupkan keberagaman serta kerja sama mencari solusi bagi permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Terdapat tiga target kelompok kegiatan interfidei yaitu pemimpin agama berbasis komunitas, guru-guru, serta kaum muda (aktivis, LSM, Ormas Pemuda dan mahasiswa).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat dikatakan bahwa intoleransi merupakan sebuah indikasi telah terjadi kesenjangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila (Putri, dkk, 2021, hal. 2). Hal ini tentunya memiliki relevansi dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran maupun mata kuliah memiliki peranan penting dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, kebhinnekaan dan Pancasila diharapkan mampu menanamkan, menguatkan dan membina pesert didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dengan baik dan benar maka akan mampu menguatkan toleransi serta menjadi warga negara yang baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian narasi (*narrative inquiry*) karena peneliti ingin berfokus pada pengalaman individu atau sekelompok orang dari para pengurus Institut Dialog Antariman, kemudian dari hasil narasi secara mendalam tersebut, peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai peran Institut Dialog Antariman dalam mencegah intoleransi. Tempat penelitian dilakukan di Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) yang beralamat di Jl. Banteng Utama, No. 59 Perum Banteng Baru, Banteng, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2021. Kemudian subjek penelitian ini diantaranya : (1) Direktur Institut Dialog Antariman, (2) Wakil direktur Institut Dialog Antariman, (3) Ketua pengurus, (4) Staff bidang Pendidikan, (5) Staff penelitian dan pengembangan, (6) Staff bidang evaluasi dan monitoring, (7) Staff bidang media sosial. Teknik dan instrument pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Kemudian Teknik analisis datanya dengan mengumpulkan data, kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Institut Dialog Antariman dalam mencegah isu-isu intoleransi

a. Sekolah Lintas Iman (SLI)

Pendidikan lintas iman meniscayakan adanya ketebukaan wawasan peserta didik dalam memahami keyakinan agamanya dan keyakinan agama orang lain. Peserta didik diarahkan untuk memahami dengan benar sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam konteks dialog antar agama diharapkan menjadi wahana untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap hubungan antar agama di Indonesia. Melalui dialog antar agama peserta didik diajak untuk merefleksikan diri terhadap keyakinan yang dianutnya dan relevansinya dengan keyakinan agama orang lain (Salim, 2018, hal. 318).

Sekolah Lintas Iman (SLI) merupakan sebuah kegiatan untuk mempertemukan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa Kristen Duta Wacana dan mahasiswa Sanata Dharma untuk membangun dialog-dialog. Pada tahun 2021 Institut Dialog Antariman kembali melaksanakan SLI Ke-

12. SLI ini dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 09.00-12.00 WIB dengan pengecualian kondisi tertentu dan total akan ada 12 kali tatap muka yang dilaksanakan secara virtual menggunakan zoom meeting.

Tujuan kegiatan SLI ini di antaranya: (1) memberi ruang dan waktu kepada peserta untuk menggali pemahaman bersama dalam memaknai kehidupan beragam yang berakar pada nilai-nilai kehidupan bersama, (2) peserta mampu memahami situasi kebhinnekaan di tengah masyarakat Indonesia dan menjadikannya kekuatan bersama untuk membantu solidaritas kemanusiaan dan menciptakan alam serta bumi yang bersih dan sehat menghadapi pandemic covid-19, (3) memberikan ruang kepada peserta untuk berefleksi dan memahami dengan baik tentang potensi maupun usaha positif yang bisa diupayakan agama-agama dalam situasi pandemi covid-19, (4) peserta memikirkan bersama hal-hal apa yang perlu dikritisi dan dibangun bersama secara positif dan dialogis kepada pihak-pihak yang tepat agar menghasilkan perbaikan dan perubahan yang baik konstruktif dan implementatif.

Selanjutnya sesi kelas berupa bercerita tentang pengalaman berjumpa dengan yang berbeda, udar prasangka, kuliah umum, kunjungan ke rumah ibadah, kunjungan ke Lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas dan refleksi. Kemudian peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 orang (perempuan dan laki-laki) 8 orang terdiri dari Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 8 orang dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, 8 orang dari Fakultas Teologi Wedabakti Universitas Sanata Dharma, 6 orang dari Institut Dialog Antariman. Peserta merupakan mahasiswa yang sedang menempuh semester V/VII dan berkomitmen mengikuti keseluruhan proses perkuliahan hingga akhir.

SLI ini termasuk ke dalam kategori Pendidikan lintas iman, hal ini dikarenakan peserta SLI berasal dari mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Dengan adanya Pendidikan lintas iman inilah peserta SLI akan belajar untuk memahami agamanya dan memahmai agama lain sehingga dalam hal ini akan mengupas tuntas terkait stereotype negative atau anggapan-anggapan negative terkait suatu agama serta akan mampu menumbuhkan sikap kritis dan meningkatkan sikap toleransi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) memiliki peran yang cukup penting untuk mencegah kasus-kasus Intoleransi di Yogyakarta. Peran tersebut dapat dilihat dari adanya program kerja seperti Sekolah Lintas Iman (SLI). Dengan diselenggarakannya program kerja ini yang memiliki target mahasiswa maka akan mampu memberikan pemahaman serta pengalaman kepada mahasiswa terkait pentingnya memahami perbedaan dan keberagaman.

b. Pelatihan Guru-Guru

Pelatihan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar. Ini berbeda dari pendidikan yang memberikan pengetahuan terhadap suatu subyek tertentu secara umum, karena pelatihan memusatkan diri pada kebutuhan khusus dalam pekerjaan. Biasanya tujuannya adalah memperbaiki kinerja dari tugas terakhir, meminta untuk melaksanakan tugas yang pejabatnya belum terbiasa atau menyiapkan individu untuk perubahan yang mungkin terjadi Definisi pelatihan yang berwawasan luas dirumuskan oleh Komisi Tenaga Kerja seperti berikut suatu proses terencana untuk mengubah sikap, pengetahuan atau tingkah laku keahlian melalui pengalaman, untuk mencapai kinerja yang efektif dalam kegiatan atau sejumlah kegiatan. Tujuannya dalam situasi kerja untuk mengembangkan kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi saat ini dan mendatang (Sahari, 2015, hal. 68).

Pelatihan bagi suatu organisasi merupakan aktivitas yang sangat penting dilakukan, di mana hal tersebut akan memengaruhi tingkat produktivitas kerja dan prestasi kerja bagi tenaga kerja itu sendiri maupun lembaga di mana pekerja tersebut bekerja, sedangkan tenaga kerja yang berada di lingkup sekolah adalah guru (Yuliana dkk, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu upaya untuk mengajarkan keahlian atau pemahaman tertentu, selain itu pula pelatihan ini perlu dilakukan untuk mengemabngkan kemampuan atau pengetahuan sehingga akan mampu menjawab tantangan seiring berkembangnya zaman.

Pelatihan guru-guru merupakan sebuah forum untuk kepala sekolah ataupun guru-guru di seluruh SMA/SMK di Yogyakarta baik swasta maupun negeri. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2004. Pada tahun 2021 Institut Dialog Antariman kembali melaksanakan program kerja ini. Kegiatan ini dilaksanakan dua tahap yang berlangsung dari bulan April-Juni 2021. Dengan mempertimbangkan banyak peserta, kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 gelombang. Kegiatan tahap I yang berfokus pada pembahasan tentang dasar-dasar dan strategi dalam mengelola dan memaknai perbedaan di lingkungan sekolah (SMA/SMK) di DIY. Lokakarya akan diselenggarakan selama tiga hari dengan materi di antaranya tentang berbagai pengalaman berinteraksi dengan yang berbeda, udar prasangka, serta kunjungan virtual dan berdialog dengan pihak SMA/SMK lain khususnya tentang bagaimana pengalaman dan mengelola dan memaknai perbedaan di lingkungan sekolah masing-masing. Pada tahap ini juga akan diselenggarakan seminar yang akan menjadi narasumber baik dari lingkungan sekolah DIY, Disdikpora DIY, serta akademisi atau ahli pendidikan keberagaman. Setelah lokakarya tahap 1, para alumni lokakarya akan difasilitasi untuk membentuk sebuah forum komunikasi dan Kerjasama. Kemudian Loka karya tahap 2 berfokus pada pendalaman pemahaman alumni lokakarya tahap 1 tentang konteks di mana mereka berada. Antara lain tentang Keistimewaan DIY, Pancasila, dan Kebangsaan. Lokakarya ini diselenggarakan selama lima hari, namun tidak harus berurutan. Pada tahap ini juga dilakukan kunjungan virtual dan dialog antara para partisipan lokakarya dengan pemerintah DIY, Parampara Praja, Keraton Ngayogyakarta, DPD RI dari DIY serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

Daftar peserta pada tahap 1 yaitu 3 orang guru lintas bidang studi, dari 35 SMA/SMK Negeri maupun swasta dari 4 kabupaten. Selanjutnya pada tahap ke 2 ini diikuti oleh 173 orang kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan dan 3 guru bidang lintas studi dari 47 SMA/SMK Negeri maupun swasta. Pada tahap 2 ini dilaksanakan pada 16-18 November dan 24-25 November 2021.

Menurut Nurdin (2016) terdapat beberapa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu:

- 1) Pemercepat, perubahan yang memiliki empat fungsi yaitu: membantu masyarakat menyadari dan melihat kondisi mereka, membangkitkan dan mengembangkan organisasi dalam masyarakat, mengembangkan relasi interpersonal yang baik, dan memfasilitasi perencanaan yang efektif.
- 2) Perantara: terkait erat dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat.
- 3) Pendidik, kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, serta mudah ditangkap boleh komunitas yang menjadi sasaran atau perubahan.
- 4) Tenaga ahli, peran ini memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area.
- 5) Perencanaan sosial, mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisisnya, dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut.
- 6) Advokat, berperan untuk melakukan pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.

- 7) Berperan sebagai aktivis yang berusaha melakukan perubahan yang lebih mendasar dan bertujuan pengalihan sumber daya (hal. 29).

Berdasarkan penjelasan di atas terkait peran Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelatihan Guru-Guru (Loka Karya Guru) yang diselenggarakan oleh Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) dapat dikategorikan memiliki peran sebagai pemercepat yang memiliki fungsi yakni membantu masyarakat menyadari dan melihat mereka kondisi mereka serta berfungsi sebagai memfasilitasi perencanaan yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada Institut Dialog Antariman dalam menjalankan program kerja loka karya guru yang memiliki tujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam hal ini targetnya yaitu guru-guru ataupun kepala sekolah untuk menyadari bahwa pentingnya memahami keberagaman serta perlunya menguatkan sikap toleransi.

Setelah mengikuti loka karya guru, harapannya para guru-guru memiliki pemahaman baru serta memiliki kesadaran yang lebih baik terkait keberagaman dan toleransi, sehingga guru-guru akan mampu mentransfer pengetahuan serta value tersebut ke pada peserta didik di lingkungan sekolah. kemudian tentunya kebijakan sekolah akan lebih ramah dan lebih toleransi, seperti tidak adanya pemaksaan atau kewajiban peserta didik untuk mengenakan jilbab serta kebijakan-kebijakan lain yang termasuk ke dalam intoleransi di lingkungan sekolah.

c. Pelatihan Kapasitas Pemuda Lintas Iman.

Upaya untuk membangun perdamaian dan hidup bersama dalam keragaman, merupakan tanggungjawab semua identitas, termasuk pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi merupakan pionir bangsa yang memiliki peran untuk menjaga keutuhan bangsa. Wajah Indonesia yang aman, damai dan bebas dari ancaman radikalisme dan ekstrimisme harus diciptakan. Dalam kaitan dengan itu, maka kolaborasi dan kerjasama mesti menjadi landasan berpijak (Sapulette dan Pakniany, 2019, hal. 62).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipat diketahui bahwa tanggung jawab untuk merawat keberagaman dan membangun perdamaian merupakan tanggung jawab bersama. Tidak memandang status dan lapisan masyarakat, semua masyarakat Indonesia memiliki peran yang sama dalam menjaga kerukunan serta penting untuk melaksanakan kerja sama.

Pelatihan kapasitas pemuda lintas iman merupakan sebuah forum untuk para pemuda asli Jogja ataupun yang sedang berdomisili di Jogja. Tujuan dilaksanakannya program kerja Kapasitas Pemuda Lintas Iman terdiri dari jangka pendek dan jangka Panjang. Tujuan jangka pendek yaitu; (1) menciptakan ruang bersama bagi 25 orang pemuda (10 orang dari luar Ypgyakarta, 15 orang dari wilayah DIY) untuk bertemu, berkenalan dan belajar bersama-sama tentang mengelola perbedaan dalam konteks Yogyakarta, konteks Indonesia, (2) membekali mereka dengan berbagai materi, konsep dan praktik mengelola keberagaman dan memahami konteks DIY, termasuk potensi positif dan negatif, dan (3) mengajak mereka untuk berefleksi, memaknai perbedaa di dalam konteks DIY secara bersama-sama. Kemudian tujuan jangka panjangnya yaitu; (1) menciptakan pemuda yang berbeda agama dan etnis di DIY, yang melek tentang perbedaan dan mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan positif untuk memperteguh DIY sebagai Daerah Istimewa yang toleran, (2) menciptakan pemuda yang mampu untuk memperteguh dan memperkuat Yogyakarta sebagai kota budaya, Pendidikan, pariwisata yang toleran, dan (3) menjadikan jaringan pemuda lintas iman di Yogyakarta sebagai bagian dari kekuatan bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan beradab.

Selanjutnya dengan dilaksanakannya program kerja Kapasitas Pemuda Lintas Iman diharapkan mampu; (1) dalam tiga tahun ke depan, terdapat semakin pemuda di DIY dan di daerah-daerah lain di Indonesia, melek dengan perbedaan sebagai potensi positif bagi bangsa Indonesia, (2) semakin banyak pemuda Yogyakarta yang menjadi actor perdamaian, (3) Jaringan Pemuda Antariman di Yogyakarta lebih aktif, menjadi kuat dan berkembang, dan (4) Jaringan Antariman di Yogyakarta

menjadi bagian yang kuat dari Jaringan Antariman Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) dan didukung oleh Mensesu dan Missie, Belanda, dengan mengusung tema "Peran Pemuda dalam Meneguhkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Toleran"

Menurut K.H Abdul Manan Ghani ketua PBNU mendefinisikan dialog antariman sebagai sebuah pola untuk membangun titik temu antar umat beragama serta bertujuan untuk membangun bangsa. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik berbagai macam agama, maka dari itu diperlukan dialog antaragama untuk membangun bangsa yang utuh dan sejahtera mempererat persaudaraan (Qoyyun, 2019, hal. 40-41). Kemudian selanjutnya dialog antaragama merupakan sebuah komunikasi yang melahirkan hubungan antaragama yang arif, positif, konstruktif, dan transformatif serta diarahkan untuk saling memahami dan memperkaya dalam hal ketaatan kepada kebenaran dan hormat terhadap kebebasan (Rahmat, 2017, hal. 183).

Berdasarkan bentuk-bentuk dialog antaragama menurut Armada Riyanto (Rahmat, 2017, hal. 186), pelatihan kapasitas pemuda lintas iman termasuk ke dalam dialog jenis dialog karya yang bermaksud setiap agama-agama berdialog untuk saling bekerja sama. Dalam hal ini pelatihan kapasitas pemuda lintas iman yang terdiri dari para pemuda-pemuda Yogyakarta dan mahasiswa diberikan ruang atau wadah untuk saling berdialog dan berinteraksi terkait keberagaman, setelah itu mereka akan berlatih untuk menganalisis permasalahan sosial serta berupaya memecahkan masalah intoleransi.

2. Peranan Institut Dialog Antariman dalam merespons isu-isu intoleransi.

a. Lobi Advokasi

Lobi advokasi merupakan sebuah kegiatan atau sebuah program kerja dari Institut Dialog Antariman (Interfidei) yang berupaya menjalin kerja sama dengan mitra-mitra lainnya seperti bekerjasama dengan Gubernur DIY, Dinas Pendidikan dan Olahraga.

Pengalaman advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Institut Dialog Antariman yaitu dengan Riset Wahid Institut, Setara Institute, berita media, kemudian juga advokasi meneguhkan Yogyakarta sebagai Kota Toleran sejak tahun 2016. Advokasi ini dilakukan dengan melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD DIY, Gubernur DIY, Polda DIY, wakil DIY untuk DPR RI, Parampara Praja, Kemenag DIY dan *stakeholder meeting*

Kemudian berdasarkan teori menurut Nurdin (2016, hal. 29) peran Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) dalam merespons isu-isu intoleransi memiliki peran sebagai advokat yakni yang berperan aktif dan terarah dimana komunitas menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan atau pun layanan. Dalam hal ini Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) sebagai LSM menjalin kerja sama dengan gubernur, pampara raja Jogja, Polda dan Lembaga terkait untuk membela kaum intoleransi atau lebih tepatnya mencari jalan keluar atas terjadinya kasus-kasus intoleransi. Dengan upaya tersebut maka Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) memiliki kontribusi aktif dalam merespons isu-isu intoleransi di Yogyakarta.

1. Faktor Penghambat Institut Dialog Antariman

a. Faktor penghambat yang berasal dari internal

Faktor penghambat internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Institut Dialog Antariman (Interfidei), faktor internal dapat berupa:

- 1) Perdebatan menentukan value humanism dan pluralisme.

Pluralisme secara umum dimaknai sebagai keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kaitannya dengan agama, maka pluralisme adalah keberagaman keyakinan agama terutama dalam aspek syariatnya, sementara dalam aspek esensialnya ada yang berpandangan bahwa hal itu hanya satu karena bersumber dari yang satu yaitu Tuhan. Pada aspek inilah terjadi kontroversi di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia dengan argumentasinya masing-masing (Thaib,dkk, 2020, hal. 63).

Bedasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pluralisme merupakan sebuah paham atau ideologi yang mengakui adanya keberagaman dari berbagai macam aspek kehidupan, baik itu berbeda latarbelakang agama, kepercayaan, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun disisi lain pluralisme dimaknai bahwa hal tersebut berasal dari satu Tuhan atau dapat dimaknai bahwa semua agama itu sama, hal inilah yang menuai kontroversi. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat plural hal tersebut merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dipungkiri. Namun dalam yang ini yang diperdebatkan bukan perihal masyarakat Indonesia yang plural atau multikultural, melainkan penafsiran terkait bahwa semua agama itu sama. Dalam hal inilah perlu dimaknai secara benar, karena jika tidak dipahami secara benar dan mendalam maka akan cenderung menimbulkan konflik.

Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) merupakan sebuah LSM yang sudah lama berdiri selama 30 tahun. Pada mulanya Institut Dialog Antariman mengusung value pluralisme hal tersebut karena dapat menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralism. Namun ternyata pada tahun 2005 Fatwa MUI melarang penggunaan kata pliralisme, liberalisme dan sekularisme. Menurut definisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pluralism agama adalah paham yang menganggap semua agama adalah sama. Dalam pandangan MUI, paham ini sangat berbahaya, sesat dan menyesatkan bagi umat Islam. Oleh karena itu, MUI mengharamkan pluralism agama dan melarang umat Islam menganut paham ini. Hal ini secara jelas tercantum dalam keputusan fatwa MUI Nomor 7/Munas VII/11/2005 tanggal 29 Juli 2005.

Berdasarkan fatwa MUI tersebutlah muncul perdebatan di Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) terkait pandangan pluralisme tersebut. Para anggota Institut Dialog Antariman pun berdialog dan berdiskusi, serta dalam diskusi tersebut terdapat beberapa tawaran perubahan kata seperti multikultural dan majemuk. Namun pada akhirnya Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) tetap mempertahankan dan menggunakan istilah pluralisme.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia diartikan pula sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan di mana yang satu dan lainnya saling berhubungan mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk itu manajemen sumber daya manusia harus dipandang tidak hanya sebagai proses pegelolaan manusia secara tradisional namun harus dilakukan proses pengelolaan secara strategik dan memandangnya sebagai asset berharga yang perlu dikembangkan. Proses pengelolaan manusia dalam organisasi ditangani oleh bagian manajemen sumber daya manusia yang memiliki fungsi strategis dan berperan dalam meningkatkan keefektifitasan dan efisiensi sebuah organisasi dalam mengelola manusia yang ada di dalamnya (Suryani & Foeh, 2019, hal. 1-2).

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keterlaksanaan program kerja. Karena sumber daya manusia yang akan merancang dan melaksanakan program-program kerja. Dalam Institut Dialog

Antariman pelaksanaan program-program kerja diamanahkan kepada badan eksekutif. Di Interfidei badan eksekutif hanya beranggota sepuluh orang yang terdiri dari direktur, wakil direktur, kesekretariatan, staff bidang pendidikan, staff bidang penelitian dan pengembangan, staff media sosial, staff bidang evaluasi dan monitoring, dan staff bagian dana atau keuangan. Dalam melaksanakan program kerja, anggota-anggota eksekutif tersebutlah yang merancang dan melaksanakan program kerja. Maka dari itu sumber daya manusia dirasa masih kurang karena hanya sepuluh orang tersebut yang aktif dalam melaksanakan program kerja sedangkan target dan visi misi yang hendak dicapai sangatlah besar.

3) Kurangnya dana atau modal

Dana Institut Dialog Antariman (Interfidei) berasal dari para donator. Baik donator yang berdifat perorangan atau perusahaan atau lembaga, selain itu dana Institut Dialog Antariman (Interfidei) juga berasal dari Interfidei sendiri, seperti berasal dari penjualan kaos Interfidei, buku-buku yang ditulis oleh anggota-anggota Interfidei. Kemudian dana Interfidei juga berasal dari patungan atau iuran-iuran.

4) Memperkerjakan mahasiswa yang terkadang kurang maksimal

Interfidei sering memperkerjakan mahasiswa-mahasiswa. Dalam hal inilah mahasiswa tersebut terkadang harus fokus ke dalam tugas akhir mereka, sehingga membuat mereka kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

5) Terjadinya *miss communication*

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *communicatio* yang bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif (Nurhadi dkk, 2017, hal. 91).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana orang-orang tersebut memiliki kesamaan atau pemahaman yang sama terkait topik atau isu pembahasan dalam komunikasi tersebut. Dalam hal ini tentunya komunikasi merupakan unsur yang sangat penting, karena dengan komunikasi yang baik lah akan mampu berkerja sama dengan baik, dan jika komunikasinya gagal maka tentunya akan mampu menimbulkan kesalahan pahaman bahkan dapat menimbulkan konflik-konflik.

Miss communication atau kesalahan pahaman sering terjadi antara anggota-anggota Interfidei. Anggota Interfidei berasal dari anggota yang masih usia muda hingga anggota yang sudah berusia lanjut dalam hal inilah terkadang di dalam program kerja sering terjadi *miss communication* atau kesalahpahaman.

b. Faktor penghambat yang berasal dari eksternal:

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar. Faktor penghambat Institut Dialog Antariman di antaranya:

1) Sulitnya mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda latarbelakang

Kemajemukan sudah ada di Yogyakarta dari dahulu jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, interaksi-interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat akan berujung pada dua kemungkinan, yaitu terjadinya konflik sosial dan terciptanya integrasi sosial.

Konflik-konflik sosial yang terjadi di Yogyakarta dapat dikendalikan dan mewujudkan integrasi sosial masyarakat karena adanya kekayaan nilai-nilai luhur, budaya, serta tradisi yang telah dijalankan secara turun temurun. Nilai kerukunan dan rasa hormat, serta budaya gotong royong yang telah terpatrit dalam masyarakat Yogyakarta hingga saat ini tidak mampu dikikis habis oleh modernisasi (Asmoro, 2020, hal. 103).

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta merupakan masyarakat yang sangat heterogen atau multikultural, masyarakat yang berasal dari latarbelakang yang berbeda-beda. Dalam hal inilah terkadang menjadi tantangan atau penghambat untuk menyatukan masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda tersebut, karena setiap orang memiliki keinginan dan juga sudut pandang yang berbeda-beda.

2) Sulitnya mengajak dialog orang-orang yang bersifat keras dan tertutup

Setiap masyarakat tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, ada masyarakat yang bersikap terbuka ada pula masyarakat yang sangat tertutup atau inklusif. Dalam hal inilah menjadi penghambat atau tantangan Institut Dialog Antariman untuk menjalankan program-program kerja.

3) Terkendala sinyal ataupun jaringan

Wabah corona virus disease 2019 (covid-19) yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi semua kalangan. Untuk melawan covid-19 pemerintah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial (sosial distancing), memakai masker dan selalu mencuci tangan (Fikri dkk, 2021, hal. 145).

Dalam hal inilah semua kegiatan bagi di bidang Pendidikan, perkantoran, organisasi, LSM, ataupun semua kegiatan yang beraktifitas di luar rumah dan menimbulkan kerumunan dibatasi oleh pemerintah. Sehingga pada saat ini tentunya semua kegiatan cenderung banyak dilakukan secara daring atau online guna mencegah penyebaran covid-19.

Pada masa pandemic covid-19 seperti sekarang ini, semua program kerja Institut Dialog Antariman dilaksanakan secara online dengan menggunakan media sosial seperti zoom. Dalam hal inilah terkadang peserta yang berada di wilayah yang terpencil terkadang mengalami kesulitan sinyal atau jaringan.

4) Terhambatnya skill atau kemampuan menggunakan media sosial

Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Dewasa ini, aktivitas daring yang dilakukan oleh khalayak di seluruh penjuru dunia terbilang masif dan intensif. Ada banyak motif dan tujuan yang mendasari khalayak dalam mengakses layanan daring, khususnya media sosial (Mulawarman, 2017, hal. 37-38).

Dalam beberapa program kerja seperti pelatihan guru-guru saat pandemi sekarang ini pelatihan dilaksanakan secara online, dalam proses pendaftaran peserta pun dilaksanakan secara online menggunakan google formulir. Dalam hal inilah guru-guru mengalami kesulitan dalam mengisi google formulir, hal inilah yang menyebabkan hambatan dalam hal pendataan guru-guru sebagai peserta pelatihan.

Dalam menjalankan program kerja tentunya terdapat faktor penghambat dari internal maupun eksternal namun sejauh ini penghambat-penghambat tersebut tentunya bukan menjadi suatu penghalang untuk menjalankan berbagai macam program kerja. Program kerja Institut Dialog Antariman tetap dapat berjalan walaupun masih dilaksanakan secara daring. Namun terdapat faktor penghambat internal yang dirasa cukup kontroversi yakni penggunaan istilah humanisme dan pluralisme. Humanisme sering dikaitkan dengan sekuler maka dari itu Institut Dialog Antraiman perlu

mempertegas humanisme seperti apa yang diusung, selain itu pula seyogyanya humanisme perlu difilter supaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan sebaiknya humanisme dipahami sebagai suatu paham untuk menghormati dan menghargai manusia. Kemudian paham pluralisme sempat diperdebatkan dengan munculnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa penggunaan kata pluralisme itu diharamkan atau dilarang, kontroversi ini pun tidak hanya terjadi dikalangan agamawan melainkan juga akademisi, oleh karena itu perlu kiranya Institut Dialog Antariman kembali mempertimbangkan penggunaan kata tersebut. Selain itu untuk penghambat-penghambat tersebut dapat diatasi dengan cara tetap menjalankan program kerja dengan semaksimal mungkin, membuat skala prioritas, dan semisal kesulitan dalam proses pendataan dikarenakan jaringan maka Institut Dialog Antariman akan menjalin kerja sama dengan pihak terdekat untuk membantu proses pendataan.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Peranan Institut Dialog Antariman dalam mencegah isu-isu intoleransi berupa melaksanakan program kerja Sekolah Lintas Iman (SLI), pelatihan guru-guru (loka karya), dan program kapasitas pemuda lintas iman. Semua program-program kerja tersebut dilaksanakan setiap tahunnya serta memiliki target mahasiswa, guru-guru di DIY dan pemuda-pemuda yang berdomisili di DIY, (2) Peranan Institut Dialog Antariman dalam merespons isu-isu intoleransi yaitu berupa melaksanakan program kerja loby advocation. Program kerja ini berupa menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar seperti dengan Gubernur Yogyakarta, para pamong praja serta kepolisian untuk merespons dan mengatasi isu-isu intoleransi yang ada di Yogyakarta, (3) Kendala atau faktor penghambat Institut Dialog Antariman dalam melaksanakan program-program kerja berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam anggota Institut Dialog Antariman. Faktor eksternal tersebut diantaranya; *pertama*, perdebatan menggunakan value humanisme dan pluralisme, *kedua* Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), *Ketiga*, Kurangnya dana atau modal, *Keempat*, memperkerjakan mahasiswa yang terkadang kurang maksimal, dan terjadinya *miss communication*. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar anggota Institut Dialog Antariman. Faktor eksternal tersebut diantaranya; *Pertama*, Sulitnya mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda latarbelakang, *Kedua*, Sulitnya mengajak dialog orang-orang yang bersifat keras dan tertutup, *Ketiga*, Terkendala sinyal ataupun jaringan, dan Terhambatnya skill atau kemampuan menggunakan media sosial. Walaupun banyak kendala atau faktor penghambat dalam melaksanakan program kerja baik dari internal maupun eksternal, Institut Dialog Antariman (DIAN/Interfidei) dapat mengatasinya dengan baik.

Kemudian yang menjadi saran di antaranya: (1) Untuk penelitian yang lain yang sejenis, hendaknya memperluas narasumber sehingga hasil penelitian pun akan lebih maksimal seperti mengambil narasumber dari anggota Institut Dialog Antariman dan narasumber dari masyarakat. Selain itu pula hendaknya sebelum melakukan penelitian melakukan observasi terlebih dahulu supaya dapat memastikan data-data yang hendak diambil, (2) Untuk Institut Dialog Antariman sebaiknya program kerja yang belum dapat terlaksana agar bisa segera dilaksanakan. Selain itu perlunya dokumentasi dari setiap program kerja tujuannya supaya ke depannya mampu menjadi koreksi serta program kerja pun akan lebih baik lagi. Kemudian Institut Dialog Antariman hendaknya tidak memperlama atau mempersulit penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Institut Dialog Antariman, hal tersebut supaya penelitian dapat berjalan lebih efisien dan efektif, (3) Untuk masyarakat hendaknya menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural sehingga dalam hal ini perlu meningkatkan sikap toleransi, saling bekerja sama dan tolong menolong untuk mencegah terjadinya intoleransi, (4) Untuk pemerintah sebaiknya merumuskan kebijakan-kebijakan

guna meminimalisir intoleransi serta perlu dikembangkan upaya kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas atau suatu organisasi untuk mencegah intoleransi dan merespons isu-isu intoleransi, karena dengan bekerja sama maka problematika yang dihadapi akan mudah teratasi dengan baik.

Referensi

- Aslati, Silawati, Darmawati, dkk. (2019). Sinergi polri bersama masyarakat di tanjung balai karimun dalam mencegah radikalisme dan pengalaman hadist intoleransi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(3), 233. <https://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/22731/12078>.
- Asmorojati, A.W. (2017). Dinamika pengaturan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dalam tinjauan negara kesatuan. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 438. Diambil dari <http://eprints.uad.ac.id/9937/1/433-439%20Anom%20Wahyu%20Asmorojati.pdf>.
- Fikri, M., Ananda, M.Z., Faizah, N, dkk. (2021). Kendala dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemic covid-19: sebuah kajian kritis. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 145. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2290>.
- Halili. (2016). *Supremasi intoleransi laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia tahun 2016*. Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara.
- Haryani, E. (2019). Intoleransi dan resistensi masyarakat terhadap kemajemukan : studi kasus kerukunan beragama di kota Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Harmoni*, 18(2), 284. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.405>.
- Herdiansah, A.G. & Randi. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>.
- Mulawarman., Nurfitri, A.D. (2017). Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 37-38. <http://10.22146/buletinpsikologi.22759>.
- Nurdin, M.F. (2016). *Sosiaglobal*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Bandung: Unpad Press.
- Nurhadi, Z.F., & Kurniawan, A.W. (2017). Kajian tentang efektivitas pesan dalam komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran & Penelitian*, 3(1), 89. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/253>.
- Putri, I.C. & Dewi, D.A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal intoleransi dalam hidup sosial warga negara. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(3), 2. <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/221>.
- Qoyyun, M. (2019). *Dialog antaragama dalam perspektif konferensi waligereja Indonesia (KWI) dan nahdlatul ulama (NU)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Selly Septiani, Marzuki, *Judul dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, format Sentence case (huruf kapital di awal judul, kecuali kata yang mengharuskan menggunakan huruf kapital)*

- Rahmat, S.T. (2017). Dialog antropologis antaragama dengan spiritualitas passing over. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2), 183-184. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1704>.
- Rosyid, H., Sholikin, A., Sa'diyin, M. (2018). Intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Lamongan. *Jurnal Polinter*, 4(1), 15. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/1275/865>.
- Rusdi, M. (2021). Penanganan intoleransi oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pranata Hukum*, 3(1), 144. <https://media.neliti.com/media/publications/340697-penanganan-intoleransi-oleh-pemerintah-d-7a36d049.pdf>.
- Sahari. (2015). Pengaruh Pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di SMAN 1 Likupang. *Jurnal Pendidikan Islam Iqra'*, 9(1), 68. <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v9i1.599>.
- Salim, A. (2018). Pelaksanaan Pendidikan lintas iman di Indonesia: studi kasus pada Indonesian conference on religion and peach (ICRP). *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 6(2), 318. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/4006>.
- Sapulette, A.A., & Pakniany, Y. (2019). Board game sebagai media pendidikan perdamaian pemuda dan pemudi lintas iman di Ambon. *WASKITA*, 3(2), 62. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.02.5>.
- Seftiani, S.dkk. (2020). *Wajah oluralitas yang tergerus intoleransi dan radikalisme di Sembilan daerah*. Yogyakarta: PT Kanisius Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
- Subagyo, A. (2020). Implementasi pancasila dalam menangkal intoleransi, radikalisme dan terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan*, 6(1), 14-15. <https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509>.
- Suryani, N.K., & Foeh, J. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bali: NILACAKRA Publishing House.
- Thaib, E.J, & Kango, A. (2020). Dakwa dan perdebatan soal pluralisme. *Jurnal Komunike*, 12(1), 63. <http://journal.uinmataram.ac.id>.
- Widiatmoko, S.A., & Pek, K., Iman, F.E.N, dkk. (2021). Islamic tolerance in world 4.0: membentuk kepribadian toleran dan hubungannya dengan self-control dalam bersosial media. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, 3(01), 34. <https://journal.uui.ac.id/JAMALI>.
- Yuliana,. Haryadi,. & Anggraeni. A.I. (2019). Pengaruh kompetensi dan pelatihan guru terhadap profesionalisme guru dengan motivasi sebagai variabel intervening di MI, MTS dan SMK Yayasan Pesantren Darul Abror Kedungjati. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 21(1), <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1288>.

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peranan Institut Dialog Antariman Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pencegahan Isu-Isu Intoleransi di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Nama : Selly Septiani

NIM : 18401241007

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 20 Februari 2022

Reviewer

Dr. Nasiwan, M.Si
NIP. 19650417 200212 1 001

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Marzuki, M.Ag.
NIP. 19660421 199203 1 001